

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Bali

Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia yang beribukota di Denpasar. Penduduk di Provinsi Bali sebagian besar memeluk agama Hindu. Provinsi Bali adalah daerah pariwisata dan merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia. Bali yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata ini sering menjadi tujuan kunjungan turis mancanegara maupun turis lokal Indonesia karena Bali memiliki keindahan dan kekayaan budaya yang kental dan melekat pada penduduknya.

Selain Pulau Bali, wilayah Provinsi provinsi bali terdiri dari pulau-pulau kecil disekitarnya, meliputi Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Penida, Pulau Serangan. Secara geografis, batas wilayah Pulau Bali di sebelah utara adalah laut Bali, sebelah selatan adalah Samudra Indonesia, sebelah barat adalah Provinsi Jawa Timur/Selat Bali, dan sebelah timur adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat/Selat Lombok. Provinsi Bali juga memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan, yaitu Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Batur, dan Danau Tamblingan.

Luas Wilayah Provinsi Bali mencapai 5 636.66 km². Secara administrasi wilayah Provinsi Bali dibagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, dan Pemerintah Kota Denpasar. Pusat pemerintahan ibu kota Provinsi Bali adalah terletak di daerah Renon yang termasuk wilayah Kota Denpasar.

Mengenai ibu kota perkabupaten beserta luas wilayah dari masing-masing daerah yang terdapat di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No.	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (km ²)
1.	Kab. Jembrana	Negara	841.80
2.	Kab. Tabanan	Tabanan	839.33
3.	Kab. Badung	Mengwi	418.52
4.	Kab. Gianyar	Gianyar	368.00
5.	Kab. Klungkung	Semarapura	315.00
6.	Kab. Bangli	Bangli	520.81
7.	Kab. Karangasem	Amlapura	839.54
8.	Kab. Buleleng	Singaraja	1 365.88
9.	Kota Denpasar	Denpasar	127.78
Jumlah			5 636.66

Sumber: bali dalam angka 2016

Salah satu provinsi di Indonesia yang menerpakan kebijakan Otonomi Daerah adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali diberlakukan Otonomi Daerah mulai 1 Januari 2001. Otonomi Daerah memberi kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah dengan arah dan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing, peningkatan peran serta masyarakat.

Tabel 4.2 PAD dan IPM Provinsi Bali Tahun 2010-2015

Tahun	PAD (Rp)	IPM
2010	1.393.730.257.045,34	70,10
2011	1.723.807.095.831,05	70,87
2012	2.042.091.095.774,66	71,62
2013	2.529.976.146.703,70	72,09
2014	2.920.416.697.074,56	72,48
2015	2.988.114.689.337,25	73,27

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali

IPM Provinsi Bali dari tahun 2010 hingga tahun 2015 semakin membaik. Membaiknya IPM Provinsi Bali mencerminkan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan Pulau Dewata. Realisasi PAD di Provinsi Bali pada tahun bersangkutan yang mengalami peningkatan merupakan salah satu pendukung meningkatnya IPM Provinsi Bali.

4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian

Penelitian ini mencakup 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Penelitian ini menggunakan *pooled data* atau data panel, yang digunakan dari periode 2010 hingga 2015. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 kabupaten/kota x 6 tahun = 54 amatan. Berdasarkan 54 data penelitian, dilakukan uji asumsi klasik.

Statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data dalam penelitian meliputi jumlah amatan, nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi. Nilai minimum adalah nilai paling rendah dari suatu distribusi data, sedangkan nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari suatu distribusi data. Pengukuran mean (rata-

rata) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data. Simpangan baku (*standard deviation*) merupakan rata-rata penyimpangan nilai data yang diteliti dari nilai rata-ratanya (Nata Wirawan, 2002:135).

Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
PAD	54	16.252,95	2.722.625,56	391.894,99	618.859,37
Belanja Modal	54	42.555,10	989.405,91	180.998,96	196.832,99
DAU	54	86.511,96	854.532,25	470.204,34	158.907,09
IPM	54	60,58	82,24	70,64	5,63

Keterangan: PAD, Belanja Modal dan DAU (dalam jutaan rupiah), IPM (dalam rasio)

Sumber: Lampiran 6 Hasil Statistik Dekriptif

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- 1) Variabel PAD memiliki nilai terendah sebesar 16.252,95 dan nilai tertinggi sebesar 272.2625,56 dengan nilai rata-rata sebesar 391.894,99. Standar deviasi untuk PAD sebesar 618.859,37. Artinya terjadi penyimpangan nilai PAD yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 618.859,37.
- 2) Variabel Belanja Modal memiliki nilai terendah sebesar 42.555,10 dan nilai tertinggi sebesar 989.405,91 dengan nilai rata-rata sebesar 180.998,96. Standar deviasi untuk Belanja Modal sebesar 196.832,99. Artinya terjadi penyimpangan nilai Belanja Modal yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 196.832,99.
- 3) Variabel DAU memiliki nilai terendah sebesar 86.511,96 dan nilai tertinggi sebesar 854.532,25 dengan nilai rata-rata sebesar 470.204,34. Standar deviasi untuk DAU sebesar 158.907,09. Artinya terjadi penyimpangan nilai DAU yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 158.907,09.

- 4) Variabel IPM memiliki nilai terendah sebesar 60,58 dan nilai tertinggi sebesar 82,24 dengan nilai rata-rata sebesar 70,64. Standar deviasi untuk IPM sebesar 5,63. Artinya terjadi penyimpangan nilai IPM yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 5,63.

Setelah mengetahui sebaran data maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal, model regresi tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas atau model termasuk dalam kategori BLUE (*Best Linier Unbias Etimator*).

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual dalam model regresi penelitian ini mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil pengujian normalitas terhadap 54 amatan dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
N	54
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	1,131
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,155

Sumber: Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 1,131 dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,155. Nilai tersebut

menunjukkan bahwa secara statistik nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi secara normal.

4.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melacak adanya korelasi auto atau pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam model regresi. Uji autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin-Watson. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1 & 2	2,516

Sumber: *Lampiran 4 Hasil Uji Autokorelasi*

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5, nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 2,516. Nilai dU untuk jumlah sampel 54 dengan dua variabel bebas adalah 1,721 dan nilai dL 1,378. Persamaan dikatakan bebas autokorelasi ketika nilai Durbin Watson berada diantara $dU < DW < 4-dL$. Oleh karena nilai dU 1,721 dan nilai 4-dL adalah sebesar 2,622 maka dapat dikatakan persamaan regresi moderasi penelitian bebas gejala autokorelasi ($1,721 < 2,516 < 2,622$).

4.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 10% (0,1) dan VIF kurang dari 10, maka model dikatakan

bebas dari gejala multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD (X ₁)	0,332	3,012
BM (X ₂)	0,332	3,010
DAU (X _M)	0,997	1,003

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa untuk variabel PAD nilai *tolerance* adalah 0,332 ($> 0,1$) dan nilai VIF sebesar 3,012 (< 10). Untuk variabel BM, nilai *tolerance* adalah 0,332 ($> 0,1$) dan nilai VIF sebesar 3,010 (< 10). Untuk variabel DAU, nilai *tolerance* adalah 0,997 ($> 0,1$) dan nilai VIF sebesar 1,003 (< 10). Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% (0,1) dan VIF semua variabel lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini, untuk menguji apakah model regresi mengandung gejala heteroskedastisitas atau tidak, dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Agar model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas,

maka nilai signifikan variabel bebas terhadap absolute residual harus lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian Heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	T	Sig.	Keterangan
1 (Constant)			
PAD (X_1)	-1,366	0,178	NH
BM (X_2)	1,709	0,094	NH
DAU (XM)	0,727	0,471	NH

NH: tidak terjadi Heteroskedastisitas (*No Heteroskedastisitas*)

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai sig. dari masing-masing variabel adalah di atas 0,05. Hal ini menandakan bahwa seluruh variabel tersebut dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas.

4.3 Uji Kesesuaian Model (Uji F) dan Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji Kesesuaian Model (uji F) dimaksudkan dalam rangka mengetahui apakah dalam penelitian ini model yang digunakan layak untuk digunakan atau tidak sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependennya. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Kesesuaian Model
(Sebelum dan sesudah moderasi)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 (Sebelum)					
Regression	1108,038	2	554,019	49,306	0,000 ^a
Residual	573,054	51	11,236		
Total	1681,092	53			
2 (Sesudah)					
Regression	1249,905	5	249,981	27,828	0,000 ^b
Residual	431,187	48	8,983		
Total	1681,092	53			

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa *p-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ menunjukkan model penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen dan moderasi pada variabel dependen. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel PAD, Belanja Modal, DAU dan pemoderasi berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu IPM.

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikatnya. Pada penelitian ini koefisien determinasi dilihat melalui nilai *Adjusted R²* yang terlihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil *Adjusted R²*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,812 ^a	0,659	0,646	3,35207
2	0,862 ^b	0,744	0,717	2,99718

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,646 yang memiliki arti bahwa 64,6% variasi perubahan IPM dapat dijelaskan oleh

variabel independen yaitu PAD, Belanja Modal, dan DAU. Sedangkan, sisanya 35,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Persamaan kedua menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,717 yang memiliki arti bahwa 71,7% variasi perubahan IPM dapat dijelaskan oleh variabel independen PAD, Belanja Modal, DAU dan pemoderasi. Sedangkan sisanya 28,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Model moderasi lebih baik dari pada model regresi berganda karena nilai *Adjusted R²* lebih besar.

4.4 *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel merupakan variabel pemoderasi adalah dengan melakukan uji interaksi. Regresi dengan melakukan uji interaksi antarvariabel disebut dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Analisis MRA diolah dengan bantuan program SPSS. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil *Moderated Regression Analysis*

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardize d Coefficients</i>	Sig.	Hasil
	B	<i>Std. Error</i>	Beta		
(Constant)	41,307	8,366		0,000	
PAD	11,148	1,516	1,043	0,000	Diterima
Belanja Modal	-5,963	2,361	-0,307	0,035	Ditolak
(Constant)	1121,137	363,616		0,003	
PAD	-98,574	42,291	-9,224	0,024	
Belanja Modal	-96,330	82,787	-5,194	0,250	
DAU	-193,939	65,208	-6,287	0,005	
X ₁ M	19,987	7,631	10,776	0,012	Diterima
X ₂ M	16,013	14,814	5,405	0,285	Ditolak

Sumber: Lampiran 7, data diolah (2016)

Persamaan regresi yang dihasilkan melalui *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 1121,137 - 98,574 \text{ PAD} - 96,330 \text{ Belanja Modal} - 193,939 \text{ DAU} + 19,987 \text{ X1M} + 16,013 \text{ X2M} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) Nilai konstanta 1121,137 memiliki arti apabila PAD, Belanja Modal, DAU, dan Pemoderasi konstan, maka IPM akan sebesar 1121,137 satuan. Ini berarti walaupun tanpa PAD, Belanja Modal, dan DAU kabupaten/kota di Provinsi Bali telah memiliki IPM sebesar 1121,137 satuan. Hal ini dikarenakan adanya bantuan berupa pengobatan gratis, beasiswa/ dana bantuan operasional sekolah, serta masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan bertani dan berternak.
- 2) Nilai koefisien regresi PAD sebesar -98,574 memiliki arti apabila PAD naik sebesar satu satuan, maka IPM turun sebesar 98,574 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 3) Nilai koefisien regresi Belanja Modal sebesar -96,330 memiliki arti apabila Belanja Modal naik sebesar satu satuan, maka IPM turun sebesar 96,330 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 4) Nilai koefisien regresi DAU sebesar -193,939 memiliki arti apabila DAU naik sebesar satu satuan, maka IPM turun sebesar 193,939 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 5) Nilai koefisien regresi interaksi PAD dan DAU sebesar 19,987 memiliki arti bahwa apabila interaksi PAD dan DAU naik sebesar satu satuan, maka IPM naik sebesar 19,987 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

- 6) Nilai koefisien regresi interaksi Belanja Modal dan DAU sebesar 16,013 memiliki arti bahwa apabila interaksi Belanja Modal dan DAU naik sebesar satu satuan, maka IPM naik sebesar 16,013 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

4.5 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dan variabel moderasi secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan hasil nilai signifikansi dengan $\alpha = 0,05$ dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai signifikansi uji t dua sisi untuk variabel PAD sebesar 0,000 maka tingkat signifikan t pada uji satu sisi adalah 0,000 lebih rendah dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 11,148. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD berpengaruh pada IPM dan arah pengaruhnya positif, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

2) Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai signifikansi uji t dua sisi untuk variabel Belanja Modal sebesar 0,035 maka tingkat signifikan t pada uji satu sisi adalah 0,018 lebih rendah dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -5,963. Hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Modal berpengaruh pada IPM dan arah pengaruhnya negatif, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

3) Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai signifikansi uji t dua sisi untuk variabel interaksi PAD dan DAU sebesar 0,012 maka tingkat signifikan t pada uji satu sisi adalah 0,006 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 19,987. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan pada IPM, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

4) Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai signifikansi uji t dua sisi untuk variabel interaksi Belanja Modal dan DAU sebesar 0,285 maka tingkat signifikan t pada uji satu sisi adalah 0,143 lebih tinggi dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 16,013. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi Belanja Modal dan DAU tidak berpengaruh signifikan pada IPM, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai signifikansi uji t dua sisi untuk variabel PAD sebesar 0,000 maka tingkat signifikan t pada uji satu sisi adalah 0,000 lebih rendah dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 11,148. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD berpengaruh signifikan pada IPM dan arah pengaruhnya positif, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut yang diukur melalui IPM akan meningkat. Hal ini dikarenakan, dengan semakin meningkatnya PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah memungkinkan daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik, memenuhi kebutuhan publik, menjalankan aktivitas pemerintahan menjadi semakin baik serta membiayai pembangunan daerahnya yang akhirnya berimbas pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Selain itu salah satu sumber penerimaan PAD berasal dari pajak yang disetorkan masyarakat sehingga sudah sewajarnya PAD dialokasikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat (digunakan untuk sektor-sektor yang meningkatkan IPM). Ini sejalan dengan Pamudi (2008) yang mengatakan tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri dimana tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamudi (2008) yang menyatakan bahwa jika PAD meningkat maka IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat akan meningkat, Setyowati dan Suparwati (2012) yang menyatakan PAD terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan Lugastoro (2013) yang menyatakan bahwa rasio PAD terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Jawa Timur.

4.6.2 Pengaruh Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah belanja modal berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai signifikansi uji t dua sisi untuk variabel Belanja Modal sebesar 0,035 maka tingkat signifikan t pada uji satu sisi adalah 0,018 lebih rendah dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -5,963. Hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan pada IPM dan arah pengaruhnya negatif, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mirza, 2012) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini dikarenakan kurangnya studi kelayakan dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan belanja modal pemerintah mengalami mangkrak bahkan gagal, adanya belanja modal yang dilakukan pemerintah saat ini tetapi manfaatnya dirasakan beberapa tahun kemudian (manfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak langsung dirasakan), adanya belanja modal yang sudah terealisasi namun pengelolaannya kurang maksimal, serta kecilnya porsi belanja modal jika dibandingkan dengan yang lain. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astia, 2015) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM dan (Vegirawati, 2012) yang menyatakan belanja langsung tidak dapat dijadikan alat untuk memprediksi IPM (dimana belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal).

Kegagalan Belanja Modal mempengaruhi IPM ini terjadi, disamping karena masih rendahnya belanja modal yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga dikarenakan pengalokasian Belanja Modal belum dilakukan secara tepat sasaran. Adanya pengalokasian Belanja Modal pada urusan pemerintah yang tidak terkait dengan masyarakat seperti pengadaan rumah dinas, pengadaan kendaraan dinas, dan pembangunan gedung pemerintah yang berlebihan turut menjadi faktornya. Kegagalan ini kemungkinan terjadi karena adanya belanja modal yang terhenti di tengah jalan pengadaanya dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat (mubasir). Contohnya seperti mangkraknya pelabuhan Gunaksa di kabupaten Klungkung.

4.6.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia yang dimoderasi oleh Dana Alokasi Umum seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa tingkat signifikan t uji dua sisi sebesar 0,012 yang menunjukkan angka lebih besar daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05 dengan nilai koefisien regresi PADDAU sebesar 19,987. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan pada IPM, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh dan mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini menerima hipotesis H_3 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan IPM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut yang diukur melalui IPM akan meningkat. Dengan adanya tambahan dana transfer berupa DAU dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki sumber dana yang lebih untuk peningkatan pembangunan dan memperbaiki infrastruktur untuk keperluan publik seperti, perbaikan sarana penunjang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum, sehingga Provinsi Bali dapat dikatakan berhasil mengelola sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum untuk membiaya pembangunan sehingga dapat menaikkan tingkat IPM di Provinsi Bali.

4.6.4 Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum pada Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai signifikansi uji t dua sisi untuk variabel interaksi Belanja Modal dan DAU sebesar 0,285 maka tingkat signifikan t pada uji satu sisi adalah 0,143 lebih tinggi dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi BMDAU sebesar 16,013. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi BM dan DAU tidak berpengaruh signifikan pada IPM, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh atau tidak mampu memoderasi hubungan antara Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini menolak hipotesis H₄ yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum mampu memoderasi hubungan antara Belanja Modal dengan IPM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diterimanya DAU oleh pemerintah daerah berarti daerah memiliki dana tambahan yang dapat dialokasikan pada sektor-

sektor yang dapat meningkatkan IPM, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur tetapi tidak cukup besar. Hal ini dikarenakan dalam formulasi DAU, komponen alokasi dasar masih menjadi komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai (gaji PNS) sehingga peningkatan DAU justru menyebabkan penurunan IPM, karena sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai bukan dialokasikan untuk belanja modal ke sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pembangunan pasar.